



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDOLLAH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **498201**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.830.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1250 m2/250 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/98 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 598 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/216 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 984.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOTOR, YAMAHA X TRAIID Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000



4. MOBIL, TOYOTA MAGH10R-BRXMBD 2.0 V HV CVT / MINIBUS
Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.178.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	383.988.079
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	13.376.488.079
III. HUTANG	Rp.	2.075.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.301.488.079

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.